

**BABALIAK KA NAGARI:
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN NAGARI KINARI
KABUPATEN SOLOK
1999 – 2023**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menperoleh Gelar Sarjana

Humaniora Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas



OLEH:

MUCHNI HADI PUTRA

1910713001

Dosen Pembimbing:

WITRIANTO, S.S, M.Hum., M.Si.

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

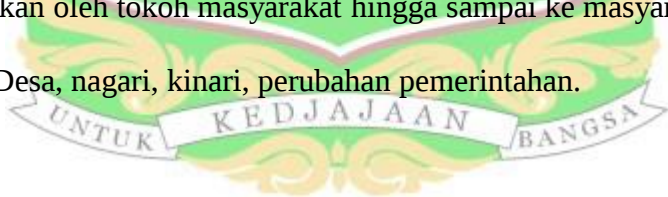
Skripsi ini berjudul “***Babaliak ka Nagari : Perkembangan Pemerintahan Nagari Kinari 1999-2023***”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode sejarah. Terdiri dari empat tahap yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi (menafsirkan data), dan yang terakhir historiografi (penulisan). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan melalui metode sejarah lisan dan wawancara. Sumber yang didapat di kritik dengan tujuan menguji kebenarannya. Setelah itu dilakukan interpretasi atau penafsiran dari sumber. Terakhir dilakukan historiografi atau penulisan.

Fokus kajian ini yakni perubahan sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari di Kinari pada tahun 1999 sampai tahun 2023. Dalam suatu pemerintahan maka tidak akan terlepas ke dalam pembahasan demokrasi serta otonomi daerah. Di suatu pemerintahan nantinya juga akan berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta budaya, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dari para pemangku jabatan untuk kemaslahatan masyarakatnya.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 mengenai penyeragaman sistem pemerintahan desa dan pelaksanaannya pada tahun 1983, sistem pemerintahan nagari yang sebelumnya digunakan di Sumatera Barat digantikan oleh sistem pemerintahan desa. Kemudian pada tahun 1999 pemerintahan desa diganti kembali dengan pemerintahan nagari yang memiliki slogan *babaliak ka nagari*. Perubahan ini membawa dampak positif maupun negatif bagi pemerintah dan masyarakat.

Pemerintahan desa dirasa tidak cocok dengan kultur dan budaya Minangkabau yang ada di Kinari, ketidakcocokan nya sistem pemerintahan desa seperti pembagian wilayah desa, kepemimpinan sistem pemerintahan desa dan lainnya, dirasakan oleh tokoh masyarakat hingga sampai ke masyarakat sendiri.

Kata kunci : Desa, nagari, kinari, perubahan pemerintahan.



ABSTRACT

This thesis is titled ***“Babaliak ka Nagari : Perkembangan Pemerintahan Nagari Kinari 1999-2023”***. The method used in this research is the historical method. It consists of four stages, namely heuristics (data collection), source criticism, interpretation (interpreting data), and finally historiography (writing). Data collection was conducted through literature review and field research using oral history methods and interviews. The sources obtained were critically analyzed to verify their authenticity. Following this, interpretation or analysis of the sources was performed. Finally, historiography or writing was carried out.

The focus of this study is the change in the Desa government system to the Nagari government system in Kinari from 1999 to 2023. In any government, the discussion of democracy and regional autonomy cannot be separated. A government will also have an impact on social, economic, and cultural conditions by implementing policies from officials for the benefit of the community.

Following the implementation of Undang-Undang No. 5 1979, on the standardization of the desa governance system and its implementation in 1983, the nagari governance system previously used in West Sumatra was replaced by the desa governance system. Then, in 1999, the desa governance system was replaced again with the nagari governance system, which had the slogan “babaliak ka nagari”. This change brought both positive and negative impacts for the government and the community.

The desa government system was deemed unsuitable for the Minangkabau culture and traditions in Kinari. The incompatibility of desa government system, such as the division of village territories, the leadership structure of the village government system, and other aspects, was felt by community leaders and the community itself.

Keyword : Desa, nagari, kinari, perubahan pemerintahan.

